

AN ANALYSIS OF LEADERSHIP AND STRUGGLE IN THE 2026 UNITED STATES–VENEZUELA CONFLICT TO ENHANCE THE CAPABILITIES OF THE INDONESIAN NAVY IN DEVELOPING OPERATIONAL STRATEGIES

Ferry Prasetiadi^{#1}, Sabono Wantoro^{#2}, Muh. Ilham^{#3}

[#] *Strategi Operasi Laut, Politeknik Angkatan Laut*

Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230

ferryprasetiadi19664@gmail.com

Abstract — *This study examines the 2026 conflict between the United States and Venezuela through the lenses of transformational leadership, realism in international relations, crisis decision-making, and asymmetric warfare. Using a qualitative method, the research analyzes the chronology of the conflict from the pre-crisis phase, the outbreak of military confrontation, and its post-conflict regional and global repercussions. The findings show that the conflict was driven by the intersection of geopolitical rivalry, energy security, military pressure, and ideological contestation. From a leadership perspective, Donald Trump and Nicolás Maduro demonstrated contrasting but equally decisive leadership styles in responding to crisis conditions. From a realist perspective, the conflict reflected the pursuit of national interests, power projection, and the struggle to preserve regional influence. The study also finds that crisis decision-making under time pressure and uncertainty shaped rapid strategic choices on both sides, while Venezuela's response illustrated the relevance of asymmetric warfare in confronting a militarily superior adversary. Furthermore, the conflict generated humanitarian, diplomatic, and energy-related consequences that extended beyond the two states. For Indonesia, particularly the Navy, the case offers important lessons on maritime readiness, joint operations, defense diplomacy, and post-conflict stabilization.*

Keywords — *Leadership, Strategies, Asymmetric Warfare*

I. PENDAHULUAN

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela merupakan fenomena yang telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak krisis politik dan ekonomi Venezuela semakin memburuk pada pertengahan 2010-an. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Venezuela ditandai oleh penerapan sanksi ekonomi yang intensif, terutama pada sektor energi, yang bertujuan menekan pemerintahan Nicolás Maduro (Corrales, 2020). Pada periode mutakhir, eskalasi ketegangan tersebut semakin meningkat seiring dengan upaya Amerika Serikat untuk membatasi ekspor minyak Venezuela melalui kontrol maritim dan tekanan terhadap jaringan perdagangan energi global (Monaldi, 2020). Kondisi ini mencerminkan bahwa konflik tidak hanya bersifat politik, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan strategis dalam sektor energi global.

Dalam konteks keamanan internasional, penggunaan kekuatan militer maupun ancaman intervensi oleh Amerika Serikat merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan stabilitas kawasan dan kepentingan geopolitik, khususnya di belahan Barat (Ellner, 2019). Intervensi semacam ini sering kali dikaitkan dengan doktrin keamanan nasional Amerika Serikat yang menempatkan kawasan Amerika Latin sebagai wilayah strategis yang tidak terpisahkan dari kepentingan nasionalnya (Brands, 2010). Oleh karena itu, peningkatan aktivitas militer, baik dalam bentuk kehadiran angkatan laut maupun operasi terbatas, dapat dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat tekanan terhadap rezim yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan tersebut.

Selain faktor politik dan militer, aspek energi menjadi variabel utama dalam konflik Amerika Serikat dan Venezuela. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, yang menjadikannya aktor penting dalam sistem energi global (Monaldi, 2020). Ketergantungan pasar global terhadap stabilitas pasokan energi menyebabkan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, memiliki kepentingan langsung terhadap kondisi internal Venezuela. Sanksi ekonomi yang menargetkan sektor minyak terbukti memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Venezuela, sekaligus memicu dinamika konflik yang lebih luas (Weisbrot & Sachs, 2019). Di sisi lain, pemerintah Venezuela mengadopsi pendekatan nasionalisme energi sebagai respons terhadap tekanan eksternal, yang semakin memperumit penyelesaian konflik secara diplomatik.

Dampak dari konflik ini tidak hanya terbatas pada kedua negara, tetapi juga meluas ke kawasan regional dan global. Krisis Venezuela telah memicu salah satu gelombang migrasi terbesar di dunia, yang berdampak pada stabilitas negara-negara tetangga di Amerika Latin (Freier & Parent, 2019). Selain itu, gangguan terhadap produksi dan distribusi minyak Venezuela turut memengaruhi volatilitas pasar energi global, yang berimplikasi pada keamanan energi internasional. Dalam perspektif keamanan maritim, dinamika ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan negara dalam menghadapi potensi gangguan terhadap jalur distribusi energi dan stabilitas kawasan.

Dalam konteks Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut, dinamika konflik ini memberikan pelajaran strategis terkait pentingnya penguatan kemampuan operasi maritim dan diplomasi pertahanan. Sebagai negara kepulauan dengan kepentingan besar dalam keamanan jalur laut internasional, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi potensi dampak konflik global, termasuk gangguan terhadap stabilitas energi dan keamanan maritim (Till, 2018). Oleh karena itu, analisis terhadap kepemimpinan dan dinamika perjuangan dalam konflik Amerika Serikat dan Venezuela menjadi relevan sebagai dasar dalam pengembangan strategi operasi TNI Angkatan Laut guna mendukung stabilitas keamanan nasional dan kontribusi Indonesia dalam keamanan maritim global.

Untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat mewujudkan konsep hasil penelitian yang komprehensif, maka peneliti menggunakan landasan pemikiran sebagai berikut:

a. Teori Kepemimpinan Transformasional.

Teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Bass dan Riggio (2006) menekankan peran pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasi pengikut untuk mencapai tujuan yang melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi atau kolektif yang lebih besar. Kepemimpinan ini berfokus pada peningkatan motivasi intrinsik, pengembangan kapasitas individu, serta penciptaan perubahan positif yang berkelanjutan dalam organisasi. Bass dan Riggio (2006) mengidentifikasi empat komponen utama dalam kepemimpinan transformasional, yaitu *idealized influence* (pengaruh ideal), *inspirational motivation* (motivasi inspiratif), *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual), dan *individualized consideration* (perhatian individual), yang secara bersama-sama mendorong pengikut untuk mencapai kinerja di atas ekspektasi. Pemimpin transformasional tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membangun visi bersama, menanamkan nilai, serta memberdayakan pengikut dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks.

Dalam konteks konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis gaya kepemimpinan masing-masing pihak. Kepemimpinan Presiden Amerika Serikat dapat dilihat dari kemampuannya dalam membangun dukungan domestik dan internasional terhadap kebijakan luar negeri melalui narasi keamanan dan kepentingan strategis. Hal ini mencerminkan aspek motivasi inspiratif dan pengaruh ideal dalam kepemimpinan transformasional. Di sisi lain, kepemimpinan Nicolás Maduro dapat dianalisis sebagai upaya mempertahankan legitimasi kekuasaan melalui mobilisasi ideologi dan nasionalisme, meskipun menghadapi tekanan eksternal yang signifikan.

b. Teori Realisme dalam Hubungan Internasional.

Menurut teori realisme dalam hubungan internasional, negara merupakan aktor utama yang bertindak secara rasional untuk mengejar kepentingan nasionalnya, terutama dalam menjaga kekuatan (*power*) dan keamanan (*security*). Morgenthau (1978) menegaskan bahwa politik internasional pada dasarnya merupakan suatu perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (*struggle for power*), di mana setiap negara berupaya memaksimalkan kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional yang kompetitif. Selanjutnya, Waltz (1979) melalui teori neorealisme menyatakan bahwa sistem internasional bersifat anarkis, yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara. Kondisi ini mendorong setiap negara untuk mengandalkan kemampuan sendiri (*self-help*) guna mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survival*), sehingga persaingan kekuatan menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Dalam konteks ini, tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan hegemoninya serta melindungi kepentingan strategis, khususnya dalam bidang energi dan stabilitas kawasan. Keterlibatan militer dan tekanan politik yang dilakukan mencerminkan prinsip dasar realisme, yaitu penggunaan kekuatan sebagai instrumen utama dalam mencapai kepentingan nasional. Selain itu, posisi Venezuela sebagai negara dengan cadangan energi besar menjadikannya wilayah strategis yang memiliki nilai geopolitik tinggi, sehingga menarik intervensi dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat.

c. Teori Keputusan dalam Krisis.

Teori pengambilan keputusan dalam krisis mengkaji bagaimana pemimpin dan pembuat kebijakan mengambil keputusan dalam situasi yang ditandai oleh tekanan tinggi, keterbatasan waktu, ketidakpastian informasi, serta risiko yang besar. Salah satu pendekatan utama dalam teori ini dikemukakan oleh Graham T. Allison melalui karyanya *Essence of Decision*, yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam situasi krisis tidak selalu bersifat rasional dan linear, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur organisasi, dinamika politik internal, serta persepsi para aktor yang terlibat (Allison, 1999). Allison mengemukakan tiga model utama dalam menganalisis pengambilan keputusan, yaitu *rational actor model*, *organizational process model*, dan *bureaucratic politics model*. Model rasional melihat negara sebagai aktor tunggal yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan strategis, sedangkan model organisasi menekankan peran prosedur dan rutinitas institusi. Adapun model politik birokrasi menyoroti bahwa keputusan merupakan hasil dari negosiasi dan kompromi antar aktor dalam pemerintahan (Allison, 1999). Dalam situasi krisis, proses pengambilan keputusan sering kali berlangsung di bawah tekanan untuk bertindak cepat, sehingga pemimpin harus mengambil keputusan meskipun informasi yang tersedia terbatas dan belum sepenuhnya akurat. Kondisi ini juga membuka kemungkinan terjadinya bias kognitif serta kesalahan persepsi dalam menilai ancaman dan peluang (Paulus et al., 2022).

Dalam konteks konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana kedua negara merespons situasi kritis yang melibatkan ancaman militer dan tekanan diplomatik. Keputusan Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan militer dan ekonomi dapat dianalisis sebagai hasil dari pertimbangan rasional terhadap kepentingan strategis, sekaligus dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan institusional. Sementara itu, respons Venezuela dalam mempertahankan kedaulatan negara mencerminkan proses pengambilan keputusan dalam kondisi krisis yang sarat tekanan eksternal dan keterbatasan sumber daya.

d. Teori Perang Asimetris.

Teori perang asimetris menjelaskan bahwa konflik modern sering kali melibatkan pihak-pihak dengan perbedaan kekuatan yang signifikan, baik dari segi militer, teknologi, maupun sumber daya. Dalam kondisi tersebut, pihak yang lebih lemah cenderung tidak menghadapi lawan secara konvensional, melainkan menggunakan strategi dan taktik yang tidak simetris, inovatif, dan tidak terduga untuk mengeksploitasi kelemahan pihak yang lebih kuat (Metz & Johnson, 2001). Perang asimetris ditandai oleh penggunaan taktik non-konvensional seperti perang gerilya, insurgensi, perang siber, serta pemanfaatan medan operasi yang kompleks seperti wilayah perkotaan atau hutan untuk mengimbangi superioritas militer lawan (Chehtman, 2022). Selain itu, strategi asimetris berfokus pada upaya memanfaatkan celah dalam kekuatan lawan melalui pendekatan tidak langsung, sehingga pihak yang lebih lemah tetap memiliki peluang untuk memperlambat bahkan mengalahkan kekuatan yang lebih besar (Nurhayati, et al., 2023).

Dalam konteks konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana Venezuela, meskipun memiliki keterbatasan dalam kekuatan militer konvensional dibandingkan Amerika Serikat, dapat mengadopsi strategi perang asimetris. Pendekatan tersebut dapat berupa penggunaan taktik gerilya, mobilisasi milisi sipil, serta pemanfaatan kondisi geografis dan sosial untuk menghambat operasi militer lawan. Lingkungan perkotaan dan wilayah dengan karakteristik medan yang kompleks memberikan keuntungan bagi pihak yang lebih lemah untuk melakukan perlawanan yang efektif terhadap kekuatan superior.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian kualitatif dimulai dengan berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan, lalu menganalisa dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti untuk mengolah secara berulang-ulang tema dan data base penelitian hingga dapat membangun tema yang utuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam tulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kronologis kejadian

1) Pra Kejadian. Kronologis pra kejadian konflik Amerika Serikat dengan Venezuela tahun 2026, adalah sebagai berikut:

a) Sejak sekitar September 2025, ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela meningkat secara signifikan seiring dengan intensifikasi operasi keamanan maritim oleh AS di kawasan Karibia. Operasi tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkotika transnasional, namun menuai kritik karena dianggap melampaui batas yurisdiksi dan berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara. Sejumlah analis menilai bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konteks penegakan hukum internasional dapat memperburuk hubungan bilateral dan meningkatkan risiko konflik terbuka (Mishra & Chaudhary, 2025).

b) Menjelang akhir 2025, Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di kawasan Karibia melalui pengerahan aset angkatan laut strategis, termasuk kapal induk dan kapal perusak. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari strategi tekanan terhadap pemerintahan Nicolás Maduro, yang oleh Washington dituduh terlibat dalam jaringan kriminal transnasional dan praktik “*narco-state*”. Peningkatan kehadiran militer tersebut memicu respons defensif dari Venezuela, termasuk peningkatan latihan militer nasional dan mobilisasi pasukan, yang mempertinggi ketegangan regional (Trinkunas, 2022).

c) Memasuki akhir 2025 hingga awal 2026, tekanan terhadap Venezuela tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ekonomi dan intelijen. Amerika Serikat meningkatkan sanksi terhadap sektor energi Venezuela, terutama industri minyak yang menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut. Selain itu, dukungan terhadap aktor oposisi juga meningkat sebagai bagian dari strategi perubahan rezim secara tidak langsung. Kombinasi tekanan militer dan ekonomi ini berkontribusi pada meningkatnya polarisasi politik domestik di Venezuela serta memperbesar kemungkinan eskalasi konflik (Corrales, 2020).

d) Pada akhir Desember 2025, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Venezuela mencapai titik kritis. Retorika politik dari pejabat AS yang menyebut rezim Maduro sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan, disertai dengan peningkatan sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik, semakin mempersempit ruang dialog bilateral. Para analis hubungan internasional menilai bahwa kondisi ini mencerminkan pola klasik eskalasi konflik, di mana tekanan berlapis (militer, ekonomi, dan diplomatik) meningkatkan probabilitas terjadinya intervensi terbuka (Brands, 2010).

2) Kejadian. Kronologis kejadian konflik Amerika Serikat dengan Venezuela tahun 2026, adalah sebagai berikut:

a) Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar-besaran yang dikenal sebagai Operation Absolute Resolve. Operasi ini melibatkan serangan udara presisi terhadap instalasi militer strategis di Caracas dan wilayah sekitarnya, yang bertujuan melumpuhkan sistem pertahanan Venezuela sebelum dilakukan operasi darat oleh pasukan khusus. Dalam operasi tersebut, pasukan elit AS berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kemudian dievakuasi keluar dari Venezuela untuk menghadapi dakwaan di Amerika Serikat atas tuduhan *narco-terrorism* dan perdagangan narkotika internasional (Britannica, 2026).

b) Pasca serangan tersebut, situasi keamanan di Venezuela memburuk secara signifikan. Pemerintah Venezuela mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara dan agresi militer. Meskipun operasi AS berlangsung cepat dan terkoordinasi, militer Venezuela dilaporkan melakukan perlawanan terhadap serangan udara dan operasi darat, yang menyebabkan korban di pihak militer Venezuela serta meningkatkan ketegangan regional. Selain itu, instabilitas politik pasca penangkapan Maduro memicu kekacauan domestik serta gangguan terhadap sektor energi, khususnya produksi dan distribusi minyak yang berdampak pada pasar global (Defense One, 2026).

c) Pada 4 Januari 2026, pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa operasi militer tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melindungi keamanan nasional AS dari ancaman yang dikaitkan dengan rezim Maduro, khususnya terkait perdagangan narkotika dan dugaan dukungan terhadap jaringan kriminal internasional. Presiden AS saat itu menegaskan bahwa tindakan tersebut juga bertujuan untuk menstabilkan kawasan dan mengakhiri rezim yang dianggap otoriter. Namun, sejumlah negara di Amerika Latin serta

kekuatan global seperti Rusia dan Tiongkok mengancam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan prinsip non-intervensi (TIME, 2026)

3) Pasca Kejadian. Kronologis pasca kejadian konflik Amerika Serikat dengan Venezuela tahun 2026, adalah sebagai berikut:

a) Pada 7 Januari 2026, dampak dari operasi militer Amerika Serikat pada 3 Januari mulai dirasakan secara luas di kawasan Amerika Latin. Negara-negara tetangga seperti Kolombia, Brasil, dan Peru meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengamanan perbatasan serta mempersiapkan kemungkinan lonjakan arus pengungsi dari Venezuela. Kolombia secara khusus dilaporkan bersiap menghadapi krisis pengungsi akibat instabilitas pasca operasi militer tersebut. Respons ini mencerminkan kekhawatiran regional bahwa konflik dapat memicu krisis kemanusiaan dan ketidakstabilan lintas batas (Brookings Institution, 2026).

b) Pada 8 Januari 2026, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas eskalasi konflik di Venezuela. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan militer Amerika Serikat yang dinilai berpotensi melanggar hukum internasional dan menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Sejumlah negara, termasuk Rusia dan Tiongkok, mendesak penghentian segera operasi militer dan mendorong penyelesaian melalui jalur diplomatik. Namun, perbedaan kepentingan antar negara anggota menyebabkan tidak tercapainya resolusi yang mengikat secara konkret (OHCHR, 2026).

c) Pada 9 Januari 2026, Venezuela secara resmi meningkatkan status militernya dan menyerukan mobilisasi nasional untuk menghadapi ancaman eksternal. Retorika politik yang berkembang menegaskan narasi perlawanan terhadap intervensi asing, sementara dukungan dari beberapa negara sekutu seperti Kuba dan aktor global tertentu memperkuat dimensi geopolitik konflik. Situasi ini memperbesar risiko terbentuknya konflik proksi dan memperdalam polarisasi politik, baik di tingkat domestik maupun internasional (Atlantic Council, 2026).

d) Pada 10 Januari 2026, Amerika Serikat meningkatkan tekanan ekonomi melalui penerapan sanksi tambahan terhadap Venezuela, terutama yang menargetkan sektor energi dan sistem keuangan internasional. Kebijakan ini memperparah kondisi ekonomi domestik Venezuela yang sebelumnya telah mengalami krisis berkepanjangan. Di sisi lain, Venezuela berupaya memperluas kerja sama dengan negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok untuk memperoleh dukungan ekonomi dan militer. Dinamika ini menandai pergeseran konflik dari dimensi militer menuju perang ekonomi yang lebih luas (Council on Foreign Relations, 2025).

e) Pada 15 Januari 2026, komunitas internasional semakin mendorong upaya de-eskalasi konflik. Negara-negara di luar kawasan, termasuk Indonesia, menyerukan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi multilateral. Seruan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Upaya mediasi internasional dinilai penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat berdampak pada stabilitas global (Brookings Institution, 2026).

b. Analisis

1) Analisis Kepemimpinan

a) Analisis Kepemimpinan Presiden Donald Trump (Amerika Serikat).

Kepemimpinan Presiden Donald Trump dalam konflik dengan Venezuela pada tahun 2026 dapat dilihat dari perspektif ketegasan dan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kekuatan militer sebagai alat utama dalam merespons ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat. Trump dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang sering kali bersifat unilateral dan agresif, dan ini tercermin dalam keputusan untuk melakukan intervensi militer langsung di Venezuela pada awal Januari 2026. Keputusan tersebut, meskipun dipandang sebagai langkah yang berani untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh pemerintahan Nicolás Maduro, juga memunculkan perdebatan global terkait kedaulatan negara dan potensi pelanggaran hukum internasional. Dalam konteks ini, kepemimpinan Trump menunjukkan dominasi kebijakan luar negeri yang berfokus pada penegakan kekuasaan global dengan

tujuan untuk mengamankan sumber daya energi dunia dan memperkuat posisi AS sebagai pemimpin dunia.

Trump mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih tangguh dan otoriter dalam menghadapi Venezuela, yang tercermin dalam kebijakannya untuk melancarkan serangan militer cepat terhadap pemerintahan Maduro tanpa terlebih dahulu memperoleh dukungan penuh dari sekutu internasional atau mandat dari Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini, Trump memperlihatkan sifat pemimpin yang lebih mengutamakan tindakan langsung dan keputusan yang cepat dalam situasi krisis. Keputusan ini memperlihatkan visi Trump yang sangat pragmatis: mengatasi ancaman yang dianggap mengganggu kepentingan AS dengan cara yang cepat dan definitif. Namun, meskipun keputusan militer ini berhasil menggulingkan rezim Maduro secara cepat, kepemimpinan Trump tidak memperhitungkan dengan baik konsekuensi jangka panjang yang dapat timbul dari ketidakstabilan yang lebih besar di kawasan Latin Amerika. Keputusan ini memperburuk ketegangan dengan negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan sekutu-sekutu Venezuela, yang semakin memperbesar polarisasi internasional.

Kebijakan luar negeri Presiden Trump selama konflik ini sangat dipengaruhi oleh pendekatannya yang lebih unilateral, yang sering kali mengabaikan norma-norma internasional atau konsensus multilateral dalam pengambilan keputusan. Trump memperlihatkan sikap anti-diplomasi multilateral, memilih untuk mengambil tindakan sepihak meskipun banyak negara dan organisasi internasional, termasuk Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok, mengkritik invasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Venezuela. Kepemimpinan Trump menciptakan kesan bahwa Amerika Serikat lebih memilih untuk beroperasi di luar kerangka institusi internasional yang ada, seperti PBB atau OAS (*Organization of American States*), yang cenderung mendukung solusi diplomatik. Keputusan ini, meskipun diterima oleh beberapa pihak di dalam negeri AS yang menginginkan tindakan tegas terhadap Maduro, juga meningkatkan ketidakpercayaan internasional terhadap kebijakan luar negeri AS, sekaligus memperburuk citra internasional Amerika Serikat di dunia.

Trump sering kali mengemukakan visi keamanan nasional AS yang berfokus pada dominan global dan penguatan posisi ekonomi melalui kebijakan "*America First*". Dalam konteks konflik dengan Venezuela, keputusan militer ini mencerminkan bagaimana Trump melihat kekuatan militer sebagai alat utama untuk mengamankan kepentingan strategis AS di dunia. Dengan menegakkan kebijakan keras terhadap Maduro, Trump berusaha memastikan bahwa Venezuela tidak jatuh ke tangan negara-negara yang berlawanan dengan AS, seperti Rusia dan Tiongkok, yang memperkuat pengaruh mereka di Amerika Latin. Meskipun langkah ini mengokohkan dominasi AS di kawasan tersebut, keputusan ini tidak disertai dengan strategi jangka panjang untuk meredakan ketegangan politik dan sosial yang timbul akibat invasi tersebut. Keputusan Trump memperlihatkan bahwa meskipun ia mampu membuat langkah militer yang cepat dan memuaskan basis domestik, ia gagal untuk mengembangkan solusi politik dan diplomatik yang dapat membawa stabilitas yang lebih langgeng di kawasan tersebut. Dalam hal ini, kepemimpinan Trump memperlihatkan ketegasan dalam menghadapi tantangan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan dalam merumuskan strategi jangka panjang yang lebih konstruktif dan inklusif.

b) Analisis Kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro (Venezuela).

Kepemimpinan Nicolás Maduro ditandai oleh karakter otoriter dan autokratik yang semakin memperkuat kontrol politiknya atas negara sejak menggantikan Hugo Chávez pada 2013. Berbagai kajian politik menunjukkan bahwa di bawah pemerintahan Maduro, struktur kekuasaan di Venezuela cenderung terkonsentrasi pada dirinya dan sekelompok kecil elite yang setia, sementara lembaga demokratis seperti parlemen dan sistem peradilan disrang atau dilemahkan untuk menekan oposisi dan mempertahankan legitimasi rezimnya meskipun kondisi sosial semakin memburuk. Perilaku ini mencerminkan pola otoriter yang terus berkembang sejak era Chavismo, di mana kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan menjadi tujuan utama, bahkan ketika popularitasnya merosot tajam akibat krisis ekonomi dan penurunan dukungan publik. Ketika Maduro menghadapi tekanan eksternal seperti sanksi ekonomi dan kritik internasional, gaya kepemimpinan ini semakin mengekang ruang politik di dalam negeri dan menciptakan polarisasi sosial yang tajam antara pendukung rezim dan kelompok oposisi yang menuntut perubahan politik radikal.

Maduro sering menghadapi tantangan legitimasi politik karena tuduhan bahwa kemenangan elektoralnya tidak mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Analisis demokrasi menunjukkan bahwa kepemimpinannya sering dipandang sebagai hasil dari manipulasi institusional dan kendali yang kuat atas aparat keamanan, yang membuat oposisi sulit untuk menyaingi pengaruhnya. Ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi semakin memperkuat narasi bahwa kekuasaan Maduro bertahan bukan karena dukungan mayoritas, tetapi karena dominasi struktural terhadap mekanisme negara. Dalam menghadapi tekanan dari pihak oposisi yang memobilisasi massa dan menuntut reformasi demokratis, Maduro cenderung menggunakan pendekatan reaktif, termasuk penahanan tokoh oposisi dan penggunaan instrumen hukum untuk melemahkan kritik internal. Pendekatan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang defensif, yang semakin memperuncing konflik internal dan memperdalam polarisasi sosial di masyarakat Venezuela.

Kepemimpinan Maduro berkontribusi signifikan terhadap kekacauan internal Venezuela, termasuk keruntuhan ekonomi, krisis kemanusiaan, dan migrasi massal yang kemudian mengundang intervensi dari kekuatan asing seperti Amerika Serikat. Rezimnya dikenal menolak reformasi signifikan meskipun tekanan ekonomi dan sosial terus meningkat, dan dalam beberapa kasus menggunakan kontrol ketat terhadap media serta hukum untuk mempertahankan narasi dominan. Ketika krisis mencapai puncaknya, langkah-langkah represif yang diambil Maduro memperburuk stabilitas nasional dan memberi kesempatan bagi negara lain untuk menjustifikasi intervensi mereka di bawah alasan keamanan dan kemanusiaan. Analisis politik internasional sering menunjukkan bahwa kepemimpinan Maduro, meskipun bertahan sampai 2026, tidak berhasil menciptakan stabilitas politik yang substantif di Venezuela, justru memperparah konflik internal dan memicu respons keras dari komunitas internasional.

2) Analisis Kejuangan

a) Analisis Kejuangan Amerika Serikat.

Kejuangan Amerika Serikat dalam konflik dengan Venezuela tahun 2026 menunjukkan keunggulan taktis yang didukung oleh teknologi militer canggih. Pasukan AS menggunakan serangan udara presisi tinggi, pesawat siluman, dan sistem pertahanan anti-rudal untuk menghancurkan infrastruktur militer Venezuela dengan sedikit kerugian. Serangan udara yang dimulai dengan "*Operation Absolute Resolve*" menargetkan pos-pos strategis, seperti pangkalan militer, komunikasi, dan fasilitas energi yang vital bagi kelangsungan pemerintah Maduro. Kejuangan AS dalam hal efisiensi serangan dan kekuatan teknologi memungkinkan mereka untuk meraih kemenangan taktis dalam waktu yang relatif singkat, tanpa harus menghadapi konfrontasi langsung yang memakan waktu lama. Ini mencerminkan strategi militer modern yang mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan pengurangan kerugian di pihak sendiri.

Selain keunggulan teknologi, kejuangan Amerika Serikat juga tercermin dalam kemampuannya untuk menggunakan kekuatan multilateral dalam mengisolasi Venezuela dari dukungan internasional. Sebelum operasi militer dimulai, AS berhasil memperoleh dukungan dari beberapa negara sekutu, termasuk Kanada, Colombia, dan sejumlah negara Eropa, meskipun banyak negara lain mengkritik langkah ini. Amerika Serikat mengedepankan strategi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga sanksi ekonomi, blokade perdagangan, dan penyebaran propaganda untuk mengisolasi Venezuela dari aliansi internasional. Kejuangan ini menegaskan bahwa kekuatan militer AS tidak hanya terletak pada operasi di medan perang, tetapi juga dalam kemampuan mengkoordinasi aliansi geopolitik untuk memperburuk posisi negara lawan.

Salah satu ciri khas kejuangan Amerika Serikat adalah kemampuan untuk membuat keputusan militer yang tegas dan cepat, yang tercermin dalam serangan militer yang diluncurkan dengan sedikit persiapan diplomatik. Presiden Donald Trump sebagai pemimpin AS, memutuskan untuk meluncurkan serangan meskipun tidak memperoleh mandat PBB atau konsensus internasional yang luas. Kejuangan ini mencerminkan kepercayaan diri AS dalam menggunakan kekuatan militer langsung untuk mencapai tujuan strategisnya. Keputusan ini dapat dilihat sebagai bukti dari kebijakan luar negeri "*America First*" yang lebih menekankan pada aksi sepihak dan penegakan kepentingan nasional melalui kekuatan militer, meskipun langkah ini mengundang kecaman internasional.

Meskipun Amerika Serikat menunjukkan keunggulan taktis yang signifikan, kekuatan militer AS dalam konflik ini memiliki kelemahan yang jelas dalam hal perencanaan pasca-perang. Keberhasilan menggulingkan Presiden Maduro dan menghancurkan pasukan Venezuela tidak disertai dengan rencana yang jelas untuk menangani ketidakstabilan pasca-operasi di negara tersebut. Situasi di Venezuela pasca-serangan justru memperburuk kekerasan sektarian dan konflik internal antara kelompok yang pro-pemerintah dan oposisi, yang memunculkan krisis kemanusiaan besar. Kejuangan Amerika Serikat dalam hal ini mengungkapkan bahwa meskipun kemampuan militer mereka unggul dalam pertempuran cepat, mereka gagal dalam merumuskan strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara yang telah hancur, yang merupakan elemen kunci dalam kemenangan yang berkelanjutan.

b) Analisis Kejuangan Venezuela.

Kejuangan Venezuela dalam konflik 2026 bermula dari penolakan keras terhadap apa yang disebut pemerintah sebagai agresi militer ilegal oleh Amerika Serikat. Setelah serangan besar-besaran AS pada 3 Januari 2026, di mana Presiden Nicolás Maduro ditangkap oleh pasukan AS dalam operasi gabungan di Caracas dan sekitarnya, pemerintah Venezuela menyatakan bahwa tindakan militer tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Pemerintah yang masih loyal kepada Maduro, yang kemudian diwakili oleh Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara, menggambarkan invasi itu sebagai upaya asing untuk menciptakan dominasi geopolitik, dan menyerukan mobilisasi rakyat Venezuela untuk mempertahankan wilayah serta identitas nasional mereka. Pernyataan resmi ini menguatkan narasi bahwa penjajahan modern melalui intervensi militer harus dilawan bukan hanya oleh militer formal, tetapi juga oleh seluruh elemen bangsa.

Sebagai bagian dari kejuangan militer, pemerintah Venezuela mengerahkan pasukan reguler dan kelompok milisi lokal untuk menanggapi intervensi Asing dan mengamankan kontrol atas beberapa area. Sejumlah laporan media menggambarkan bagaimana *colectivos* dan pasukan paramiliter pro-pemerintah ditempatkan di sejumlah titik strategis di Caracas untuk mencegah kolaborasi dengan pasukan AS dan untuk mempertahankan struktur sosial internal selama masa darurat. Mobilisasi ini mencerminkan pendekatan kejuangan yang mencakup perlawanan bersenjata lokal di samping militer Venezuela yang tersisa, menunjukkan bahwa meskipun struktur komando negara mengalami gangguan akibat hilangnya pemimpin tertinggi, respons militer dan milisi tetap aktif dalam mempertahankan klaim atas kedaulatan nasional.

Kejuangan Venezuela juga melibatkan upaya mempertahankan stabilitas wilayah domestik di tengah krisis politik dan sosial yang diperparah oleh tindakan militer AS. Pemerintah sementara di bawah Delcy Rodríguez mengambil langkah untuk menjaga ketertiban publik dan melancarkan narasi patriotik yang bertujuan menjaga solidaritas nasional. Pemberlakuan darurat nasional dan penutupan perbatasan menunjukkan bahwa strategi kejuangan tidak hanya berupa pertempuran langsung tetapi juga mencakup upaya mempertahankan legitimasi pemerintahan yang tersisa, serta mengelola ketegangan dengan kelompok oposisi dan masyarakat sipil di tengah tekanan eksternal. Ini menunjukkan bentuk kejuangan yang multidimensi antara militer, mobilisasi sosial, dan politik domestik yang dirancang untuk menjaga kelangsungan negara dari ancaman luar.

Meskipun Venezuela menunjukkan bentuk perlawanan yang kokoh, kejuangan tersebut menghadapi tantangan besar dari dominasi militer dan politik AS serta tekanan internasional untuk solusi damai. Setelah eskalasi militer, Venezuela menghadapi tekanan diplomatik dari negara lain, termasuk seruan PBB dan Uni Eropa untuk meredakan konflik dan melindungi hukum internasional, serta kritik dari negara sekutu AS yang memandang invasi sebagai langkah kontroversial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejuangan Venezuela bukan sekadar pertempuran militer, tetapi juga melibatkan pertempuran diplomatik dan legitimasi internasional, di mana pemerintah Venezuela harus berjuang mempertahankan persepsi internasional tentang hak mereka atas kedaulatan. Di sisi domestik, tekanan sosial akibat krisis ekonomi dan dampak perang menyebabkan kebutuhan strategi yang lebih luas

untuk menjaga kohesi bangsa tetap utuh meskipun menghadapi kekuatan asing yang jauh superior secara militer.

c. Pembahasan.

1) Tinjauan Aspek Teori Kepemimpinan Transformasional.

Teori Kepemimpinan Transformasional, yang pertama kali dikembangkan oleh James Burns dan Bernard Bass, menggambarkan pemimpin yang dapat menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan lebih besar daripada kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks Presiden Donald Trump dan kebijakan luar negerinya terhadap Venezuela, teori ini terlihat dalam cara Trump memimpin negara dengan visi yang tegas dan ambisius. Trump berhasil mengkomunikasikan visinya untuk "mengembalikan Amerika" dan melindungi kepentingan energi nasional dengan menggunakan kekuatan militer untuk menanggapi apa yang dia anggap sebagai ancaman terhadap stabilitas global. Meskipun tindakannya dianggap otoriter oleh banyak pihak, Trump mampu menginspirasi kelompok dalam negeri yang mendukung kebijakan luar negeri AS yang lebih agresif, dan memperoleh legitimasi dalam merespons situasi dengan tindakan cepat dan konkret. Dalam hal ini, kepemimpinan transformasional Trump menggambarkan bagaimana ia memobilisasi negara untuk mencapai tujuan global yang lebih besar, meskipun melalui perubahan radikal dalam kebijakan luar negeri.

Di sisi lain, kepemimpinan Nicolás Maduro dalam menghadapi invasi Amerika Serikat dapat dianalisis melalui lensa yang sama, meskipun dengan karakteristik yang berbeda. Maduro, meskipun menghadapi ancaman internasional dan krisis domestik yang parah, berhasil mempertahankan kendali atas negara dengan menggugah identitas nasional dan patriotisme rakyat Venezuela. Dalam hal ini, Maduro menggunakan kepemimpinan transformasional untuk menginspirasi rakyatnya untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari perlawanan terhadap kekuatan besar yang berusaha menggulingkan pemerintahan mereka. Melalui retorika revolusioner, Maduro berhasil memobilisasi kelompok pro-pemerintah dan memperkuat dukungan dari milisi paramiliter yang loyal. Meskipun Maduro tidak sepenuhnya berhasil dalam menciptakan kestabilan politik, ia mampu menggugah rasa kebersamaan dan identitas kolektif untuk mempertahankan rezim di tengah tekanan eksternal yang intens.

Kedua pemimpin ini, meskipun sangat berbeda dalam cara mereka mencapai tujuan mereka, mengimplementasikan prinsip kepemimpinan transformasional yang serupa dalam hal visinya dan kemampuannya untuk memotivasi pengikut. Trump, dengan mengandalkan agresi militer dan kebijakan luar negeri yang kuat, menggunakan visi nasionalis untuk memobilisasi dukungan domestik, sementara Maduro, meskipun dihadapkan pada kesulitan besar, memanfaatkan narasi patriotik untuk mempertahankan legitimasi di mata rakyatnya. Trump menciptakan kepercayaan melalui ketegasan dalam kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kekuatan dan proteksi, sementara Maduro, meskipun kekuasaannya semakin terancam, mengandalkan retorika revolusioner untuk menguatkan rasa solidaritas di antara kelompok yang mendukungnya. Keberhasilan Trump dalam menarik dukungan dari kelompok konservatif Amerika dan keberhasilan Maduro dalam mempertahankan struktur sosial dan politik di Venezuela, meskipun dalam kondisi yang sangat menantang, menunjukkan bagaimana kepemimpinan transformasional dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan, meskipun dalam konteks yang sangat berbeda.

Implikasi kepemimpinan transformasional dalam konflik ini menunjukkan bagaimana kedua pemimpin ini, meskipun berada dalam posisi yang berbeda secara internasional dan domestik, dapat menggerakkan masyarakat mereka menuju tujuan yang sangat berbeda. Donald Trump, dengan kepemimpinan yang lebih berorientasi pada kekuatan dan militer, menunjukkan bagaimana keputusan yang tegas dan langsung dapat memobilisasi sumber daya nasional untuk meraih kemenangan cepat di medan perang, meskipun sering kali diabaikan konteks diplomatiknya. Sebaliknya, Nicolás Maduro mengandalkan kepemimpinan berbasis ideologi, yang berfokus pada pertahanan kedaulatan nasional dan identitas bangsa meskipun menghadapi krisis domestik yang parah. Kedua gaya kepemimpinan ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh pemimpin dalam membentuk arah strategi negara dan mobilisasi kekuatan rakyat, baik dalam konteks internal maupun dalam menghadapi tekanan eksternal. Konflik ini menyoroti peran kepemimpinan transformasional dalam membangun visi kolektif yang memungkinkan kedua negara untuk bertahan dalam menghadapi tantangan besar, meskipun dengan jalan yang sangat berbeda.

2) Tinjauan Aspek Teori Realisme dalam Hubungan Internasional.

Teori realisme dalam hubungan internasional, yang berakar pada pemikiran Hans Morgenthau dan dipopulerkan oleh Kenneth Waltz, menekankan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kekuasaan. Dalam kerangka ini, negara-negara dilihat sebagai aktor utama yang terlibat dalam interaksi yang didorong oleh kepentingan politik dan militer, bukan oleh pertimbangan moral atau nilai-nilai universal. Dalam konteks konflik Amerika Serikat dengan Venezuela pada tahun 2026, teori realisme memberikan penjelasan yang jelas tentang mengapa AS mengintervensi Venezuela dan bagaimana kepentingan nasional dan dominasi kekuasaan global mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut.

Salah satu prinsip utama dalam teori realisme adalah bahwa negara selalu berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan dan keamanan mereka. Dalam hal ini, Amerika Serikat memandang Venezuela sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas kawasan dan pengaruh global AS. Venezuela, dengan cadangan minyak terbesar di dunia dan hubungan yang semakin dekat dengan negara-negara yang dianggap sebagai penantang hegemoni AS, seperti Rusia dan Tiongkok, membuat negara tersebut menjadi subjek penting dalam kebijakan luar negeri AS. Intervensi militer yang dilakukan oleh AS terhadap Venezuela pada Januari 2026 dapat dilihat sebagai langkah untuk mempertahankan supremasi Amerika Serikat di kawasan Karibia dan Amerika Latin. Dalam teori realisme, tindakan ini merupakan respons terhadap ancaman potensial terhadap kepentingan strategis AS, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga pengaruh politik dalam menghadapi negara-negara yang memiliki potensi menantang dominasi global AS.

Di sisi lain, Venezuela, dengan kepemimpinan Nicolás Maduro, menerapkan prinsip realistik dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan nasional. Dalam teori realisme, negara yang dianggap lebih lemah, seperti Venezuela, sering kali mengandalkan perlawanan asimetris atau strategi bertahan untuk mempertahankan eksistensi negara mereka. Meskipun Venezuela menghadapi superioritas militer AS, mereka memperkuat koalisi dengan negara-negara sekutu seperti Rusia dan Tiongkok, yang memberikan dukungan diplomatik dan militer untuk mengimbangi ancaman yang datang dari AS. Dengan demikian, kejuangan Venezuela dapat dianalisis melalui lensa realisme sebagai upaya untuk memperkuat kekuatan dan keamanan melalui aliansi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dalam menantang dominasi AS. Venezuela juga memanfaatkan retorika anti-imperialisme untuk memperkuat identitas nasional dan melawan campur tangan asing.

Realpolitik, konsep yang terkait erat dengan realisme, menunjukkan bahwa negara-negara bertindak dengan rasionalitas dan pragmatisme demi mencapai tujuan mereka, terutama dalam hal perjuangan untuk kekuasaan dan keamanan. Keputusan Amerika Serikat untuk mengintervensi Venezuela dan menggunakan kekuatan militer menunjukkan bahwa negara-negara besar sering kali memilih pendekatan langsung dan sepihak ketika menghadapi ancaman terhadap kepentingan mereka. Tindakan ini berakar pada pola pikir realis yang menganggap bahwa kekuatan militer adalah cara paling efektif untuk mencapai tujuan nasional, terutama dalam menghadapi negara yang dipandang sebagai rival atau ancaman. Di sisi lain, Venezuela, dengan kemampuan terbatas untuk menghadapi kekuatan militer superior, memanfaatkan dukungan internasional dan taktik bertahan untuk mengamankan kedaulatannya. Dengan menggunakan aliansi strategis dan mempertahankan kontrol atas sektor-sektor penting, seperti energi dan militer, Venezuela mencoba mengurangi dampak dari intervensi luar dan mengimbangi ketergantungannya pada kekuatan eksternal.

3) Tinjauan Aspek Teori Keputusan dalam Krisis.

Teori Keputusan dalam Krisis menyoroti bagaimana pemimpin dan negara mengambil keputusan dalam situasi yang penuh ketidakpastian, urgensi, dan tekanan. Dalam hal ini, teori ini sangat relevan untuk menganalisis keputusan-keputusan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta pemerintah Venezuela yang dipimpin oleh Nicolás Maduro, dalam konflik 2026. Keputusan-keputusan ini sering kali diambil dalam konteks yang sangat terbatas oleh informasi dan waktu yang mendesak, dan dipengaruhi oleh faktor psikologis, ketegangan geopolitik, dan kekhawatiran tentang stabilitas nasional. Dalam konflik ini, kedua negara menghadapi tantangan berat dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi tidak hanya nasib politik mereka, tetapi juga stabilitas kawasan dan peran mereka di dunia internasional.

Dalam konteks konflik dengan Venezuela, Presiden Donald Trump mengambil keputusan untuk melakukan intervensi militer tanpa melalui proses diplomatik yang panjang atau konsultasi internasional yang lebih luas. Keputusan ini menunjukkan bagaimana keputusan cepat dalam situasi

krisis menjadi prioritas dalam model kepemimpinan Trump, yang dikenal dengan keputusan sepihak dan tindakan tegas. Trump merasa terancam oleh perkembangan politik di Venezuela yang, menurut pandangannya, dapat mengancam stabilitas global dan kepentingan energi AS. Menyadari waktu yang sangat terbatas untuk mencegah Venezuela memperkuat hubungannya dengan Rusia dan Tiongkok, Trump memutuskan untuk melancarkan serangan militer besar-besaran pada 3 Januari 2026, dengan tujuan menggulingkan rezim Maduro dan mengamankan kepentingan strategis AS. Keputusan ini dipengaruhi oleh biaya kesempatan yang tinggi, di mana Trump merasa bahwa keterlambatan atau penundaan dapat memperburuk situasi, terutama terkait dengan keamanan energi global. Keputusan ini, meskipun dianggap efektif dalam menggulingkan pemerintahan Maduro secara cepat, juga menunjukkan risiko dalam pengambilan keputusan dalam krisis, karena kurangnya pertimbangan jangka panjang untuk pemulihan negara dan konsekuensi internasional. Dalam hal ini, teori keputusan dalam krisis menekankan pentingnya pemimpin untuk mengevaluasi risiko dan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Trump's keputusan untuk bertindak cepat, meskipun berhasil mengalahkan rezim Maduro, justru menghasilkan ketidakstabilan yang lebih besar di Venezuela dan kawasan yang lebih luas.

Sementara itu, Nicolás Maduro juga menghadapi krisis besar ketika Amerika Serikat melakukan serangan. Dalam menghadapi ancaman militer yang sangat besar, keputusan-keputusan yang diambil oleh Maduro mencerminkan taktik bertahan yang lebih mengutamakan ketahanan sosial dan mobilisasi domestik. Dengan informasi yang terbatas dan sumber daya yang terbatas, Maduro memilih untuk meningkatkan mobilisasi militer, mengerahkan milisi paramiliter, dan memperkuat perlawanan domestik terhadap invasi AS. Keputusan ini mencerminkan bahwa dalam krisis, terkadang pilihan yang diambil berfokus pada pertahanan kedaulatan negara dan mempertahankan kekuatan internal meskipun dengan keterbatasan kekuatan militer. Maduro juga bergantung pada prosedur keputusan yang bersifat reaktif, di mana setiap langkah yang diambil bertujuan untuk memitigasi dampak langsung dari serangan AS. Namun, ketergantungan pada strategi ini mengungkapkan kelemahan besar dalam perencanaan jangka panjang, karena Venezuela tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi ancaman secara efektif dalam jangka panjang tanpa bantuan dari sekutu internasional. Keputusan-keputusan Maduro mencerminkan bagaimana ketidakpastian situasi dalam krisis mendorong negara yang lebih lemah untuk mengandalkan taktik bertahan dan mobilisasi domestik, tetapi tanpa adanya rencana jangka panjang untuk stabilitas pasca-konflik.

Teori keputusan dalam krisis juga menggarisbawahi bagaimana bias kognitif dapat memengaruhi pengambilan keputusan pemimpin dalam kondisi krisis. Bias konfirmasi, di mana pemimpin hanya mencari informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka, terlihat jelas dalam keputusan Trump dan Maduro. Trump, dalam konteks ancaman keamanan yang dirasakannya, cenderung mempercayai informasi yang mendukung narasi bahwa Venezuela, di bawah Maduro, adalah ancaman besar terhadap kepentingan AS, dan dengan cepat memilih aksi militer sebagai solusi. Di sisi lain, Maduro, meskipun menghadapi kritik internasional, memilih untuk mempercayai bahwa solidaritas internasional dan retorika anti-imperialis dapat menggagalkan perlawanan domestik dan internasional untuk mendukung pemerintahannya, meskipun kekuatan eksternal yang dihadapi jauh lebih kuat. Kedua pemimpin ini menunjukkan bagaimana bias kognitif, baik dalam bentuk keyakinan akan ancaman atau kepercayaan terhadap legitimasi domestik, dapat mendorong keputusan yang sangat berbeda dalam mengelola krisis besar.

4) Tinjauan Aspek Teori Perang Asimetris.

Teori Perang Asimetris mengacu pada jenis konflik di mana pihak yang lebih lemah atau kurang berdaya secara militer melawan pihak yang lebih kuat, dengan menggunakan taktik yang tidak konvensional, seperti serangan gerilya, sabotase, atau serangan tak langsung. Dalam konteks konflik Amerika Serikat dengan Venezuela pada 2026, teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana Venezuela, meskipun memiliki kekuatan militer yang jauh lebih lemah, mencoba mempertahankan kedaulatan negara dan menghadapi intervensi militer AS yang sangat superior. Pemahaman tentang perang asimetris menjadi sangat penting untuk menganalisis strategi pertahanan Venezuela, terutama dalam menghadapi keunggulan teknologi dan kekuatan militer Amerika Serikat.

Dalam menghadapi serangan militer dari Amerika Serikat, Venezuela sebagai negara yang lebih lemah secara militer mengadopsi taktik gerilya dan perlawanan asimetris. Venezuela tidak dapat bersaing dengan superioritas militer AS, baik dalam jumlah pasukan maupun dalam hal

teknologi persenjataan. Oleh karena itu, mereka mengandalkan milisi paramiliter yang loyal kepada pemerintah dan kelompok gerilya yang tersebar di wilayah yang strategis untuk mengganggu jalur logistik pasukan AS dan memperumit intervensi. Sejumlah laporan menunjukkan bagaimana pasukan Venezuela menggunakan serangan tidak terduga terhadap supply line, kamp-kamp militer AS, dan infrastruktur energi untuk memperlambat kemajuan musuh. Taktik ini mengingatkan pada perang asimetris yang umum digunakan oleh pihak yang lebih lemah untuk melawan negara besar dengan kekuatan militer yang lebih dominan, dengan mengandalkan serangan mendalam dan tak terduga yang dapat menciptakan kerugian psikologis dan material yang lebih besar daripada perlawanan konvensional.

Venezuela memanfaatkan geografi wilayah yang tidak menguntungkan untuk Amerika Serikat dalam menghadapi operasi militer konvensional. Negara ini memiliki topografi pegunungan, hutan lebat, dan perairan yang sulit dijangkau oleh armada besar, yang memberikan keuntungan bagi taktik asimetris yang digunakan oleh pasukan gerilya. Wilayah-wilayah seperti Orinoco Delta dan Guayana Shield sangat sulit dijangkau oleh pasukan AS tanpa dukungan logistik yang memadai, sehingga memperumit serangan langsung yang bergantung pada kekuatan udara dan kapal induk. Dalam teori perang asimetris, kondisi geografi yang sulit diprediksi dapat menjadi senjata utama bagi pihak yang lebih lemah, mengurangi keefektifan serangan konvensional dan menciptakan kendala besar bagi pasukan musuh yang berusaha mengontrol daerah yang luas dan tidak dapat diprediksi. Venezuela memanfaatkan medan seperti ini untuk menggerakkan pasukan secara tak terduga dan menghindari pertempuran besar dengan pasukan AS yang jauh lebih superior.

Salah satu aspek dari perang asimetris adalah kemampuan pihak yang lebih lemah untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk memperlambat musuh. Dalam hal ini, Venezuela menggunakan industri minyaknya yang besar sebagai senjata diplomatik dan militer. Setelah serangan AS, Venezuela segera menargetkan infrastruktur energi dan jalur pasokan minyak yang menjadi sangat penting bagi perekonomian global dan kehidupan sehari-hari AS dan sekutunya. Serangan terhadap fasilitas minyak dan penutupan saluran ekspor energi memberi dampak besar pada perekonomian global dan meningkatkan ketegangan internasional, menciptakan dampak psikologis yang signifikan di pasar energi dunia. Dalam teori perang asimetris, kontrol terhadap sumber daya strategis seperti energi dapat menciptakan pengecekan ekonomi yang efektif terhadap musuh yang lebih kuat, memaksa mereka untuk bernegosiasi atau mengubah strategi. Venezuela dengan cerdas memanfaatkan faktor ini untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada pasokan energi dari kawasan, yang pada gilirannya memperburuk posisi internasional AS.

Teori perang asimetris juga menekankan pentingnya dukungan internasional dalam memperkuat perlawanan negara yang lebih lemah. Venezuela, meskipun menghadapi tekanan besar dari Amerika Serikat, berhasil memperoleh dukungan diplomatik dan militer dari negara-negara sekutu seperti Rusia, Tiongkok, dan Kuba. Dukungan ini memberikan penguatan signifikan bagi Venezuela dalam menghadapi dominasi militer AS, melalui pasokan senjata modern, bantuan keuangan, dan dukungan diplomatik di forum internasional. Dalam perang asimetris, negara yang lebih lemah seringkali harus mencari dukungan eksternal untuk mengimbangi ketidaksetaraan kekuatan militer, dan Venezuela memanfaatkan hubungan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan untuk memperkuat posisi tawar mereka. Dalam hal ini, aliansi internasional menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi bertahan Venezuela dalam menghadapi agresi militer dari AS.

Teori perang asimetris juga menekankan pentingnya dukungan internasional dalam memperkuat perlawanan negara yang lebih lemah. Venezuela, meskipun menghadapi tekanan besar dari Amerika Serikat, berhasil memperoleh dukungan diplomatik dan militer dari negara-negara sekutu seperti Rusia, Tiongkok, dan Kuba. Dukungan ini memberikan penguatan signifikan bagi Venezuela dalam menghadapi dominasi militer AS, melalui pasokan senjata modern, bantuan keuangan, dan dukungan diplomatik di forum internasional. Dalam perang asimetris, negara yang lebih lemah seringkali harus mencari dukungan eksternal untuk mengimbangi ketidaksetaraan kekuatan militer, dan Venezuela memanfaatkan hubungan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan untuk memperkuat posisi tawar mereka. Dalam hal ini, aliansi internasional menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi bertahan Venezuela dalam menghadapi agresi militer dari AS.

- d. Hal-hal Positif dan Negatif
 - 1) Hal-hal Positif.

- a) Kepemimpinan yang tegas, seperti yang diperlihatkan oleh Presiden Donald Trump dan Nicolás Maduro, menunjukkan keberhasilan dalam mengambil keputusan cepat dalam krisis. Dalam hal ini, tindakan Trump untuk melancarkan serangan militer yang cepat dan definitif dapat dikatakan efektif dalam menggulingkan rezim Maduro secara cepat dan efisien, meskipun terdapat dampak jangka panjang yang perlu dipertimbangkan.
 - b) Venezuela, meskipun memiliki kekuatan militer yang lebih lemah, berhasil menggerakkan mobilisasi nasional yang solid dalam menghadapi ancaman eksternal. Dengan menggugah identitas nasional dan rasa solidaritas terhadap negara, Maduro mampu mempertahankan kontrol terlepas dari krisis internal dan ancaman eksternal, menunjukkan daya juang yang kuat di kalangan rakyat Venezuela.
 - c) Amerika Serikat menunjukkan keunggulan dalam penggunaan teknologi militer canggih, seperti serangan udara presisi tinggi dan penggunaan pesawat siluman yang meminimalkan kerugian dan mempercepat kemenangan. Keunggulan ini mencerminkan kemajuan militer yang dapat digunakan dalam operasi cepat untuk mencapai tujuan strategis, sekaligus meminimalkan kerugian pasukan.
 - d) Amerika Serikat juga berhasil memperoleh dukungan dari sekutu-sekutunya sebelum melancarkan operasi militer, yang menunjukkan bahwa pengembangan strategi multilateral dapat menjadi bagian penting dari kekuatan militer dan diplomasi. Selain itu, Venezuela memanfaatkan dukungan internasional dari negara-negara seperti Rusia dan China, yang memberi mereka kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan besar dari Amerika Serikat.
- 2) Hal-hal Negatif.
- a) Salah satu dampak negatif terbesar dari keputusan militer AS adalah ketidakstabilan pasca-konflik di Venezuela. Meskipun operasi militer AS berhasil menggulingkan rezim Maduro dengan cepat, konflik ini mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah, kerusakan infrastruktur yang meluas, dan pembunuhan massal yang mempengaruhi ribuan orang. Keputusan untuk mengintervensi tanpa perencanaan pasca-perang yang matang memperburuk ketegangan domestik di Venezuela dan menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi masyarakat sipil.
 - b) Kepemimpinan Nicolás Maduro yang semakin otoriter mengakibatkan polarisasi sosial dan politik yang lebih tajam di Venezuela. Ketidakmampuan untuk mengakomodasi oposisi politik dan gerakan pro-demokrasi menyebabkan pembelahan yang lebih dalam antara kelompok pendukung Maduro dan kelompok oposisi. Hal ini menambah ketegangan sosial dan politik yang sulit diselesaikan dalam jangka pendek, serta meningkatkan kerentanan negara terhadap konflik internal.
 - c) Keputusan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer terhadap Venezuela tanpa dukungan penuh dari komunitas internasional menambah isolasi diplomatik AS. Banyak negara, termasuk sekutu-sekutu utama AS di Eropa dan kawasan Latin Amerika, mengancam intervensi sepihak ini, yang memperburuk hubungan AS dengan negara-negara yang mendukung kedaulatan Venezuela. Langkah ini memperburuk citra internasional AS sebagai negara yang lebih mengutamakan kekuatan militer daripada diplomasi dalam menyelesaikan konflik internasional.
 - d) Venezuela, sebagai penghasil minyak besar, terlibat dalam perang energi yang berdampak pada pasokan energi global. Serangan militer AS terhadap Venezuela mengganggu pasokan minyak dari negara ini dan memicu ketidakpastian energi global. Meskipun AS berusaha mengamankan kepentingan energi mereka, konflik ini justru memperburuk fluktuasi harga energi, yang merugikan ekonomi global dan menyebabkan ketegangan lebih lanjut di negara-negara yang bergantung pada sumber energi Venezuela.
- e. Manfaat yang dapat diambil bagi TNI AL.
- 1) Aspek Edukatif.
 - a) Salah satu manfaat edukatif yang dapat diambil oleh TNI AL dari konflik ini adalah pentingnya penguasaan teknologi militer canggih, seperti serangan udara presisi tinggi dan sistem pertahanan anti-rudal. Keberhasilan Amerika Serikat dalam menggunakan pesawat siluman, drone, dan sistem radar canggih menunjukkan bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas operasi militer. TNI AL perlu mengembangkan

kemampuan teknologi pertahanan dan integrasi sistem peralatan modern untuk memastikan kesiapan operasional yang optimal, baik dalam misi penjagaan kedaulatan maupun misi bantuan kemanusiaan.

b) Amerika Serikat berhasil melaksanakan operasi gabungan yang melibatkan TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat dalam serangan ke Venezuela. TNI AL dapat memanfaatkan pelajaran ini untuk meningkatkan sinergi antar angkatan dalam operasi gabungan. Melalui latihan bersama dan simulasi operasional yang melibatkan berbagai cabang, TNI AL dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat respons terhadap ancaman yang lebih kompleks, baik itu ancaman teritorial maupun ancaman terhadap keamanan maritim di perairan Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

c) Konflik dengan Venezuela memperlihatkan pentingnya pertahanan maritim yang tangguh, terutama menghadapi ancaman asimetris, seperti perang gerilya maritim dan serangan oleh kelompok non-negara. TNI AL dapat mengambil pelajaran tentang pengembangan taktik perlawanan yang lebih fleksibel, serta strategi bertahan yang tidak hanya bergantung pada pertempuran langsung, tetapi juga pada kecepatan pergerakan dan intervensi yang cepat dalam mengatasi ancaman tidak konvensional. Penguatan kapabilitas intelijen maritim dan keamanan bawah laut menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan strategi pertahanan Indonesia di masa depan.

d) Konflik ini juga menunjukkan betapa diplomasi internasional dan koalisi negara-negara sahabat memainkan peran penting dalam memperkuat posisi negara yang terancam. Bagi TNI AL, manfaat edukatif yang dapat diambil adalah pentingnya memperkuat aliansi regional dan internasional dalam menghadapi potensi ancaman global. TNI AL dapat memperluas kerja sama pertahanan maritim dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain yang memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas perairan internasional. Latihan bersama dan pertukaran informasi intelijen akan meningkatkan kesiapan operasional dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan maritim.

2) Aspek Inspiratif.

a) Salah satu hal yang sangat inspiratif dari konflik ini adalah semangat pertahanan kedaulatan negara yang ditunjukkan oleh Venezuela meskipun menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih superior. Venezuela, meskipun berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetap menunjukkan ketahanan politik dan militer dalam mempertahankan eksistensinya sebagai negara berdaulat. TNI AL bisa terinspirasi oleh keuletan dan semangat untuk mempertahankan kedaulatan negara di tengah ancaman besar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, meskipun memiliki keterbatasan sumber daya, suatu negara tetap dapat melawan dan bertahan terhadap kekuatan besar yang berusaha mendominasi wilayahnya.

b) Kepemimpinan Nicolás Maduro dalam memobilisasi rakyat Venezuela untuk tetap mempertahankan negara mereka dalam menghadapi intervensi militer besar-besaran adalah contoh nyata dari kekuatan rakyat dalam menjaga stabilitas negara. Dengan mengandalkan milisi lokal dan gerakan sosial, Maduro mampu menggerakkan massa untuk melawan agresi dari luar. Inspirasi yang dapat diambil oleh TNI AL adalah pentingnya membangun kedekatan dengan masyarakat dan menggugah rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan negara. Sebagai angkatan laut, pembinaan kepada masyarakat pesisir dan keamanan maritim berbasis rakyat dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pertahanan Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada keamanan laut.

c) Keberhasilan Venezuela dalam mendapatkan dukungan dari negara sekutu seperti Rusia dan China menunjukkan pentingnya membangun kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman eksternal. Ini adalah pelajaran yang sangat inspiratif bagi TNI AL dalam membangun kemitraan pertahanan dengan negara-negara sahabat. Keberhasilan ini mengingatkan TNI AL untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan militer domestik, tetapi juga mengembangkan hubungan internasional yang kuat dalam menghadapi ancaman yang lebih besar di masa depan, baik di kawasan maupun di dunia. Aliansi strategis dan kerja sama pertahanan sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian geopolitik.

d) Dari perspektif kepemimpinan transformasional, keputusan Donald Trump untuk mengambil langkah tegas dan cepat dengan melakukan serangan militer terhadap Venezuela

memberikan inspirasi tentang keputusan strategis yang jelas dan cepat dalam situasi kritis. Meskipun keputusan ini kontroversial, keberanian untuk mengambil tindakan tegas tanpa menunggu konsensus internasional adalah bentuk ketegasan dalam kepemimpinan yang patut dijadikan inspirasi oleh TNI AL. Dalam konteks keamanan maritim Indonesia, TNI AL dapat belajar untuk mengambil keputusan cepat dan tepat ketika menghadapi ancaman terhadap kedaulatan laut Indonesia, meskipun dengan pertimbangan matang mengenai risiko jangka panjang.

3) Aspek Instruktif.

a) Salah satu hal yang sangat instruktif dari konflik ini adalah pentingnya kesiapan operasional dalam menghadapi krisis mendadak. Keberhasilan Amerika Serikat dalam melancarkan operasi militer cepat menunjukkan bahwa pelatihan intensif dan kesiapan operasional pasukan sangat penting dalam merespons ancaman. Bagi TNI AL, ini menggarisbawahi perlunya pelatihan rutin yang terintegrasi dengan angkatan lain, mengingat ancaman yang dihadapi tidak hanya datang dari satu sektor. Pelatihan dalam operasi gabungan antara TNI AL, TNI AU, dan TNI AD, serta koordinasi logistik yang efisien, sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam operasi militer di lapangan, terlebih dalam menghadapi ancaman di laut dan perairan strategis.

b) Konflik dengan Venezuela menunjukkan betapa pentingnya untuk memiliki strategi pertahanan maritim yang fleksibel dan adaptif. Meskipun Venezuela tidak memiliki kekuatan militer yang sebanding dengan Amerika Serikat, negara ini menggunakan taktik perang asimetris yang dapat memberikan pelajaran bagi TNI AL dalam merancang taktik bertahan yang tidak konvensional di perairan Indonesia. TNI AL perlu belajar untuk memanfaatkan geografi perairan Indonesia yang sangat luas dan beragam, serta meningkatkan kemampuan intelijen maritim dan sistem pemantauan untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman dari kapal musuh atau kelompok teroris maritim dengan cara yang lebih cepat dan efisien.

c) Dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, kerja sama internasional adalah kunci untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia. Konflik ini memberikan instruksi tentang bagaimana negara-negara dapat berkolaborasi untuk menciptakan stabilitas regional, baik dalam bentuk aliansi strategis maupun dalam operasi bersama. TNI AL dapat belajar dari koalisi internasional yang dibentuk oleh Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu untuk memitigasi ancaman bersama. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan strategis, perlu memperkuat kerja sama pertahanan maritim dengan negara-negara ASEAN, India, Australia, dan negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas maritim. Latihan bersama dan pertukaran informasi intelijen akan semakin meningkatkan kapasitas TNI AL dalam menghadapi potensi ancaman di masa depan.

d) Keberhasilan Amerika Serikat dalam mengalahkan rezim Venezuela dengan cepat tidak diimbangi dengan perencanaan pasca-konflik yang matang, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik di Venezuela. Bagi TNI AL, ini adalah pelajaran penting dalam perencanaan pasca-operasi, yang mencakup bagaimana membantu membangun stabilitas di wilayah yang baru saja mengalami ketegangan atau konflik. TNI AL harus memiliki rencana jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada pertahanan nasional, tetapi juga mencakup peran dalam rekonstruksi pasca-konflik, baik dalam hal keamanan maritim maupun peran diplomatik untuk memastikan stabilitas kawasan setelah operasi militer. TNI AL harus dapat beradaptasi dan memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian, baik secara langsung maupun melalui kerja sama internasional.

4) Aspek Evaluatif.

a) Keputusan Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer cepat dan tepat terhadap Venezuela, meskipun berhasil menggulingkan rezim Maduro dalam waktu yang relatif singkat, menunjukkan kekuatan militer superior mereka. Namun, dampaknya terhadap stabilitas regional dan keamanan internasional perlu dievaluasi secara menyeluruh. TNI AL dapat menilai kembali apakah tindakan militer sepihak tanpa strategi pasca-konflik yang jelas benar-benar efektif dalam menciptakan kedamaian jangka panjang. Ini mengingatkan ketidakstabilan yang ditimbulkan pasca-operasi, yang berujung pada krisis kemanusiaan dan migrasi massal yang memengaruhi negara-negara tetangga. Evaluasi dari tindakan militer

yang cepat harus menekankan pentingnya keseimbangan antara kemenangan militer dan pembangunan perdamaian pasca-konflik.

b) Salah satu pelajaran penting yang dapat diambil oleh TNI AL dari konflik ini adalah peran diplomasi yang kurang optimal dalam meredakan ketegangan global. Amerika Serikat, meskipun memiliki kemampuan militer yang sangat unggul, gagal dalam memanfaatkan jalur diplomatik untuk menyelesaikan konflik secara damai, yang mengarah pada isolasi internasional dan peningkatan ketegangan dengan negara-negara besar. TNI AL dapat mengevaluasi pentingnya peran diplomasi multilateral dalam menjaga keamanan maritim di kawasan dan dunia. Evaluasi ini akan membantu TNI AL untuk meningkatkan kemampuan diplomatiknya, memperkuat hubungan dengan negara sahabat, dan mengembangkan kerja sama internasional sebagai langkah preventif dalam mengatasi ketegangan yang dapat memicu konflik militer.

c) Keberhasilan AS dalam melaksanakan operasi gabungan antara angkatan laut, udara, dan darat menunjukkan pentingnya kolaborasi antarangkatan dalam menghadapi ancaman besar. TNI AL perlu menggunakan konflik ini sebagai acuan untuk evaluasi kemampuan dalam melaksanakan operasi gabungan dengan TNI AD dan TNI AU, mengingat sifat ancaman yang semakin kompleks di era modern. Latihan dan simulasi gabungan dapat ditingkatkan untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antarangkatan. Evaluasi ini akan mempersiapkan TNI AL untuk melakukan tindakan yang lebih efektif ketika menghadapi situasi yang memerlukan respons dari berbagai elemen pertahanan Indonesia.

d) Konflik ini menggarisbawahi betapa pentingnya keamanan maritim dalam menjaga kedaulatan negara. Venezuela, sebagai negara dengan wilayah perairan yang luas, menggunakan strategi pertahanan maritim untuk melawan kekuatan asing. Ini memberikan pelajaran evaluatif bagi TNI AL terkait pentingnya keamanan laut Indonesia yang juga memiliki wilayah perairan yang sangat besar dan strategis. Evaluasi ini harus mencakup peningkatan kemampuan patroli maritim, penguatan sistem pengawasan laut, serta kolaborasi dengan negara-negara tetangga untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan maritim. TNI AL juga perlu mengevaluasi kapasitasnya dalam menghadapi ancaman asimetris yang semakin sering terjadi, seperti ancaman terorisme maritim dan pencurian sumber daya alam.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pemecahan masalah yang ditemukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan tegas dari Trump dan Maduro mempengaruhi hasil konflik. Keputusan cepat Trump untuk menyerang dan keteguhan Maduro dalam mempertahankan negara menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam menghadapi krisis.
- b. Venezuela menggunakan taktik perlawanan tak konvensional untuk mengimbangi kekuatan AS, dengan gerilya dan memanfaatkan medan geografi, mengajarkan pentingnya strategi bertahan dalam menghadapi dominasi militer.
- c. Keputusan Trump untuk menyerang cepat dan Maduro untuk bertahan mencerminkan pentingnya tindakan cepat dalam krisis, meski keputusan ini perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang.
- d. Diplomasi internasional menjadi kunci untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Konflik ini mengajarkan pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga keamanan global dan menyelesaikan ketegangan secara damai.

REFERENSI

- Allison, G. T., & Zelikow, P. (1999). *Essence of decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (2nd ed.). Longman.
- Atlantic Council. (2026). *What's next for Venezuela after US intervention?* Retrieved April 8, 2026, from <https://www.atlanticcouncil.org>

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781410617095>
- Brands, H. (2010a). *Dilemmas of dominance: The United States and Latin America*. Johns Hopkins University Press.
- Brands, H. (2010b). *Latin America's Cold War*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674055289>
- Britannica. (2026). *What is happening between the United States and Venezuela?* Retrieved April 8, 2026, from <https://www.britannica.com/topic/What-Is-Happening-Between-the-United-States-and-Venezuela>
- Brookings Institution. (2026). *The global implications of the US military operation in Venezuela*. Retrieved April 8, 2026, from <https://www.brookings.edu/articles/the-global-implications-of-the-us-military-operation-in-venezuela/>
- Chehtman, A. (2022). Asymmetrical warfare. In O. P. Richmond & G. Visoka (Eds.), *The Palgrave encyclopedia of peace and conflict studies*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77954-2_27
- Corrales, J. (2020). Authoritarian survival: Why Maduro has not fallen. *Journal of Democracy*, 31(3), 39–53. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0043>
- Council on Foreign Relations. (2025). *Trump's humanitarian stress test in Venezuela*. Retrieved April 8, 2026, from <https://www.cfr.org/articles/trumps-humanitarian-stress-test-venezuela>
- Defense One. (2026). *Inside Operation Absolute Resolve: Regime change assault in Venezuela*. Retrieved April 8, 2026, from <https://www.defenseone.com>
- Ellner, S. (2019). U.S. policy toward Venezuela: From sanctions to regime change. *Latin American Perspectives*, 46(1), 168–187. <https://doi.org/10.1177/0094582X18813553>
- Freier, L. F., & Parent, N. (2019). The regional response to the Venezuelan exodus. *Current History*, 118(805), 56–61. <https://doi.org/10.1525/curh.2019.118.805.56>
- Metz, S., & Johnson, D. V. (2001). *Asymmetry and U.S. military strategy: Definition, background, and strategic concepts*. Strategic Studies Institute.
- Mishra, V., & Chaudhary, P. (2025). *From sanctions to strikes: US–Venezuela tensions in the Caribbean*. Observer Research Foundation.
- Monaldi, F. (2020). The collapse of the Venezuelan oil industry: The role of above-ground risks limiting FDI. *Energy Policy*, 140, 111371. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111371>
- Morgenthau, H. J. (1978). *Politics among nations: The struggle for power and peace* (5th ed.). Alfred A. Knopf.
- Nurhayati, D., Suhirwan, & Cempaka, F. G. (2023). Strategi asimetris dalam dominasi global. *Jurnal Kajian Pertahanan*.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2026). *UN experts condemn US aggression against Venezuela*. Retrieved April 8, 2026, from <https://www.ohchr.org>
- Paulus, D., Fathi, R., Fiedrich, F., Van de Walle, B., & Comes, T. (2022). On the interplay of data and cognitive bias in crisis information management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*.
- Till, G. (2018). *Seapower: A guide for the twenty-first century* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315680846>

- TIME. (2026). *What's happening with the U.S. and Venezuela, explained*. Retrieved April 8, 2026, from <https://time.com/7344628/us-venezuela-trump-maduro-oil-drugs-war-explainer-questions-answered/>
- Trinkunas, H. (2022). *Venezuela's crisis and U.S. policy responses*. Brookings Institution.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. McGraw-Hill.
- Weisbrot, M., & Sachs, J. (2019). Economic sanctions as collective punishment: The case of Venezuela. *CEPR Report*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3436039>